

**KETERAMPILAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KARANG ANYAR
DALAM PEMBANGUNAN NON FISIK DESA
(Studi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan)**

(Skripsi)

**Oleh
Netty Ariani**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KETERAMPILAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN NON FISIK DESA (Studi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)

**Oleh
Netty Ariani**

Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi sekaligus penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat menggerakkan perangkat dan masyarakat desa agar secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa. Demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maka kepala desa harus memiliki keterampilan-keterampilan tertentu untuk diterapkan dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, data yang dianalisis bersifat kualitatif yakni menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat secara lengkap, sistematis, dan dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu pengertian dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Desa Karang Anyar telah menerapkan keterampilan kepemimpinan, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personil serta keterampilan dalam penilaian. Penerapan keterampilan tersebut mampu menggerakkan perangkat desa maupun masyarakat desa dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan non fisik desa.

Kata Kunci: Keterampilan kepala desa, pembangunan non fisik desa.

ABSTRACT

THE SKILL LEADERSHIP OF VILLAGE CHIEF IN NON PHYSICAL DEVELOPMENT (Study at Karang Anyar Village, Jati Agung Districk, South Lampung Regency)

**By
Netty Ariani**

The village chief as a highest leader and main caretaker for government, development, and village community are required to have ability to actuating village staffs and society were together participating in village development. For the sake of realization prosperous society, the village chief must to have a leader skills to be applied in effort to command, directing and manipulating society.

Research purpose of this study to knowing skills leadership of the village chief Karang Anyar in non physical development. Data collection techniues obtained by primery an secondary data qualitative analyzed is describing and explaining research result in completely, systematis form of sentence and conducted discussion to get understanding and drawn a conclusion.

The results showed ini his leadership, the village chief of Karang Anyar has implemented a leadershp skills, a skills in personal relation, a skills of proses grupu, a skill of personnel adimnistration and a skills of assessment. Implement of that skills be able to actuating village staff and society in order to planning and executing village non physical development.

Keywords: The skills of village chief, non physical develompent

**KETERAMPILAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KARANG ANYAR
DALAM PEMBANGUNAN NON FISIK DESA
(Studi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Oleh
Netty Ariani**

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

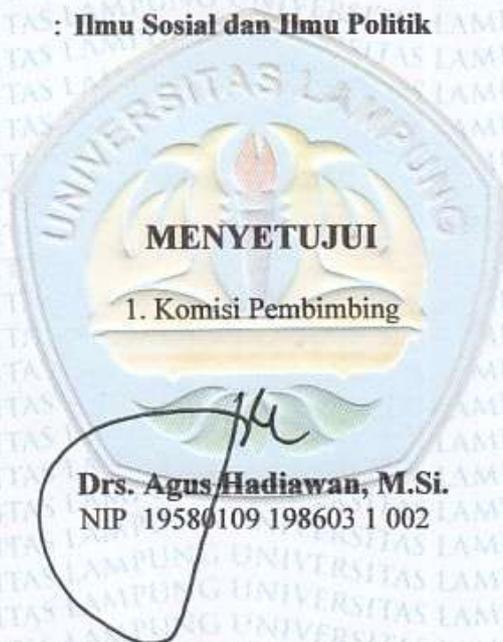
Judul Skripsi : **ETERAMPILAN KEPEMIMPINAN KEPALA
DESA KARANG ANYAR DALAM
PEMBANGUNAN NON FISIK DESA
(Studi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Netty Ariani**

No. Pokok Mahasiswa : **1116021076**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Agus Hadiawan, M.Si.**

Penguji : **Dr. Aman Toto Dwijono, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **15 Desember 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

/Bandar Lampung, Desember 2017




Netty Ariani
NPM. 1116021076

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang, 28 Februari 1994. Nama lengkap Netty Ariani, merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Admar Sabaruddin dan Ibu Erniwati. Jenjang akademik penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di TK Kesuma pada tahun 1999, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kedaton, lulus pada tahun 2005, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2008, dan dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Utama Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011.

Tahun 2011 penulis terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.

-Lessing-

Don't cry because it's over, smile because it happened.

-Dr. Seuss-

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada
kemudahan.*

(Q.S. Al Insyirah 5-6)

Selesaikanlah apa yang kamu mulai, itu tanggung jawabmu.

-Me-

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah ku ucapkan kehadiran Allah S.W.T

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang-orang yang kucintai dan mencintaiku....

- ❖ Untuk Buya dan Ibuku tercinta atas kasih sayang dan do'a yang tulus
- ❖ Untuk kakakku yang selalu sabar dan selalu memberiku dukungan

Dan

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA



Assalamualaikum Wr Wb,

Puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kekuatan lahir dan bathin kepada Penulis.

Dengan berbekal ketabahan dan kemauan yang keras, bimbingan dan ridho dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak jualah, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keterampilan Kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam Pembangunan Non Fisik Desa”. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Melalui kesempatan ini, penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si. selaku Dosen Pembimbing bagi penulis, yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Pembahas bagi penulis yang telah memberikan kritik dan saran serta gagasannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran Dosen di FISIP UNILA, seluruh staff Tata Usaha dan pegawai di FISIP dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Admar Sabaruddin dan Ibu Erniwati. Terimakasih Buya dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang tidak pernah putus bagiku. Aku sangat bersyukur memiliki dua orangtua yang kuat seperti kalian.
7. Kakak perempuanku tercinta, Septi Ariani S. Pd. I yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat di setiap lelahku.
8. Sahabatku terkasih Rosalin Chintya Arini, A. Md yang senantiasa menemani serta mendengar dengan sabar setiap keluh kesah dan letihku sejak hampir satu dasawarsa yang lalu. Aku bersyukur kita ditakdirkan untuk bertemu dan aku bersyukur untuk setiap tahun yang kita lalui bersama.
9. Teruntuk Aang Nurdin Muhayat, seseorang yang selalu memberikan dukungan, semangat serta bantuan di setiap perjuangan dan jatuh bangunku. Terimakasih telah selalu ada dalam setiap tawa, canda, suka dan duka disetiap hariku. Semoga seluruh pencapaianmu segera terwujud. Aku yakin kamu mampu mewujudkannya.

10. Sahabatku Evi Suryani, Nur Halimah, dan Intan Bariza yang telah banyak meluangkan waktunya selama ini untuk membantuku.
11. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu dan para kakak tingkat serta adik tingkat yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan menghadiri seminarku.

Serta semua pihak yang membantu, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis

Netty Ariani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 8 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2. Tinjauan Kepemimpinan | 11 |
| 2.2.1. Konsep Kepemimpinan | 11 |
| 2.2.2. Prinsip-prinsip Kepemimpinan..... | 12 |
| 2.3. Keterampilan dalam Kepemimpinan | 18 |
| 2.4. Tinjauan Kepala Desa | 19 |
| 2.4.1. Kepala Desa..... | 19 |
| 2.4.2. Kewajiban Kepala Desa | 20 |
| 2.5. Tinjauan Pembangunan Desa..... | 21 |
| 2.5.1. Pembangunan Desa | 21 |
| 2.5.2. Ruang Lingkup Pembangunan Fisik desa | 23 |
| 2.5.3. Ruang Lingkup Pembangunan non Fisik Desa | 26 |
| 2.5.4. Program-program Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Karang Anyar | 27 |
| 2.6. Kerangka Pemikiran..... | 29 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| 3.1. Tipe dan Jenis Penelitian | 33 |
| 3.2. Fokus Penelitian..... | 34 |
| 3.3. Lokasi Penelitian..... | 35 |
| 3.4. Informan Penelitian..... | 35 |
| 3.5. Jenis Data | 37 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.7. Teknik Pengolahan Data | 39 |
| 3.8. Teknik Analisis Data..... | 40 |

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Kabupaten Lampung Selatan | 43 |
| 4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan..... | 43 |
| 4.1.2. Lokasi dan Luas Wilayah | 47 |
| 4.2. Kecamatan Jati Agung | 47 |
| 4.2.1. Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung | 47 |
| 4.2.2. Batas Geografis dan Penduduk Kecamatan Jati Agung | 48 |
| 4.3. Desa Karang Anyar | 51 |
| 4.3.1. Sejarah Desa Karang Anyar | 51 |
| 4.3.2. Keadaan Umum Wilayah Desa Karang Anyar | 53 |
| 4.3.3. Kondisi Penduduk dan Pemerintahan Desa Karang Anyar | 54 |

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 5.1. Keterampilan Kepala Desa Karang Anyar dalam Kepemimpinan | 60 |
| 5.2. Keterampilan Kepala Desa Karang Anyar dalam Hubungan Insani | 75 |
| 5.3. Keterampilan Kepala Desa Karang Anyar dalam Proses Kelompok..... | 77 |
| 5.4. Keterampilan Kepala Desa Karang Anyar dalam Administrasi Personil | 80 |
| 5.5. Keterampilan Kepala Desa Karang Anyar dalam Penilaian | 82 |

VI. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| 6.1. Simpulan | 84 |
| 6.2. Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) setiap desa di Kecamatan Jati Agung tahun 2014..... | 50 |
| 2. Kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar..... | 52 |
| 3. Nama Dusun dan Jumlah Penduduk Dusun yang berada di Desa Karang Anyar..... | 55 |
| 4. Nama-nama jabatan Pemerintahan Desa Karang Anyar beserta Pejabat Aparatur Desa..... | 56 |
| 5. Sarana dan Prasarana di Desa Karang Anyar Tahun 2016 | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Haaman |
|-----------------------------|--------|
| 1. Kerangka Pemikiran..... | 32 |
| 2. Bagan Analisis Data..... | 42 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap sektor kehidupan. Pemimpin sebagai sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Pasolong (2003:170) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu keterampilan seorang pemimpin dalam memengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Jadi, kepemimpinan merupakan perilaku dan seni yang melekat pada diri setiap pemimpin.

Kedudukan kepala desa pada tingkat pemerintahan terkecil dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yakni pemerintahan desa sebagai pemimpin masyarakat desa. Kepala desa juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Menurut Karauwan (2010:1) keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa bergantung kepada seberapa jauh kepala desa merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksanaan dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kemudian dalam penjelasan umum disebutkan kepala desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya karena sangat dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Adapun tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum pada Pasal 27 poin a dan b yang menyebutkan bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab secara langsung kepada bupati melalui camat.

Berbagai faktor penting sangat berpengaruh dalam pembangunan non fisik desa antara lain adalah keterampilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keterampilan seorang pemimpin dalam kepemimpinan serta hubungan yang baik dengan bawahannya dapat membuat tujuan pemimpin akan lebih mudah terpenuhi yaitu salah satunya adalah produktivitas dalam pembangunan non fisik yang meningkat.

Memasuki era reformasi, Indonesia dihadapkan dengan perubahan arah pembangunan yang bertumpu pada peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka dan berkembang. Upaya peningkatan sumberdaya aparatur yang berkualitas harus dimulai pada tingkat pemerintahan di desa dengan asumsi bahwa

tingginya kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.

Masalah yang muncul dalam melaksanakan proses pembangunan di sebuah desa tidak hanya dikarenakan kondisi desa semata. Kesenjangan yang terjadi antara pembangunan fisik maupun non fisik desa juga dapat menimbulkan masalah. Perubahan kondisi fisik desa yang terus berjalan juga harus diikuti dengan pembangunan-pembangunan guna meningkatkan kualitas desa. Selama ini desa hanya bertumpu dalam pembangunan fisik, sehingga mengakibatkan pembangunan non fisik menjadi kurang diperhatikan.

Kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dituntut untuk mempunyai kemampuan yang dapat menggerakkan masyarakat desa untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa. Agar dapat memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat desa, sebagai aktualisasi kepemimpinannya, maka kepala desa harus mempunyai keterampilan untuk diterapkan dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Terjadinya ketidakmerataan pembangunan desa dapat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat desa dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa, sehingga fokus pembangunan non fisik desa tidak dapat dipungkiri harus menjadi perhatian bagi kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa.

Kepala desa dalam perannya sebagai pemimpin juga harus membuka mata dan memahami dengan benar kondisi desa serta masyarakat yang dipimpinnya. Setelah itu baru kemudian dapat diputuskan secara tepat langkah-langkah yang selanjutnya akan diterapkan guna mencapai tujuan yang diharapkan antara lain adalah masyarakat yang sejahtera, kemudahan pelayanan publik dalam masyarakat, serta desa yang berpotensi dan bermutu dalam mempertahankan kelangsungan hidup.

Pembangunan fisik desa adalah usaha yang dilakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi kondisi fisik desa yang terlihat. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek fisik (sarana dan prasarana) di pedesaan. Pembangunan fisik desa sangat berarti karena dampak pembangunan fisik yang bisa dirasakan masyarakat sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan perekonomian maupun kehidupan masyarakat desa. Pembangunan fisik di desa dapat dilakukan dengan adanya dukungan partisipasi masyarakat baik secara moril maupun materil sesuai kondisi fisik desa.

Desa Karang Anyar yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan terus menerus berusaha melaksanakan pembangunan. Dalam hal pembangunan fisik, Desa Karang Anyar telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan sosial maupun jalannya aktifitas pemerintahan di desa. Perbaikan saluran irigasi, pembangunan drainase serta pembangunan talud pun telah dilaksanakan. Desa Karang Anyar juga memahami betul pentingnya pembangunan non fisik desa. Sebagai sebuah

desa yang terletak dekat dengan pusat kota, Karang Anyar juga telah memiliki berbagai program kegiatan pembangunan non fisik desa guna menunjang terciptanya masyarakat desa yang berkualitas dan sejahtera.

Kenyataannya meskipun Desa Karang Anyar telah memiliki berbagai program pembangunan non fisik seperti yang tercantum dalam APB Desa Karang Anyar tahun 2016 namun berdasarkan keterangan warga setempat saat penulis melaksanakan pra riset beberapa warga mengatakan tidak tahu terkait program pembangunan non fisik yang ada di Desa Karang Anyar. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa ada yang kurang sesuai dalam pelaksanaan program pembangunan non fisik desa. Berbagai program pembangunan non fisik penting yang ada dalam APB Desa Karang Anyar tahun 2016 di antaranya adalah seperti berikut:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian,
- b. Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam,
- c. Kegiatan pameran unggulan desa,
- d. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan narkoba,
- e. Kegiatan pelatihan LPM

Beberapa kegiatan di atas adalah sebagian kegiatan program pembangunan non fisik desa Karang Anyar yang termasuk di dalam APB Desa Karang Anyar tahun 2016 namun belum terlaksana. Hal inilah kemudian yang menarik penulis untuk meneliti terkait keterampilan kepemimpinan kepala desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa.

Pada kenyataannya, ada banyak pula program pembangunan non fisik Desa Karang Anyar yang belum berjalan. Berbagai program penting seperti kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, pembinaan dan pengembangan usaha simpan pinjam, kegiatan pameran unggulan desa, kegiatan sosialisasi dan pencegahan narkoba serta kegiatan pelatihan LPM miasih belum terlaksana meskipun berbagai program kegiatan tersebut telali ada dalam program pembangunan non fisik desa berdasarkan APB Desa Karang Anyar Tahun anggaran 2016. Hal inilah kemudian yang menarik penulis untuk meneliti terkait keterampilan dalam kepemimpinan kepala desa Karang Anyar dalam melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan non fisik desa.

Penelitian ini menyoroti keterampilan kepala desa dalam pembangunan non fisik di Desa Karang Anyar. Perilaku serta kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala desa secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin dan menggerakkan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan kepala desa terkait sejauh mana peran kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian dan pelaksanaan. Hal ini penting untuk meliliat sejauh mana kepala desa juga dapat menjalankan kepemimpinan dalam fungsi manajemen.

Desa Karang Anyar sebagai desa yang memiliki letak strategis dekat dengan kota tentu saja diharapkan memiliki kemajuan dibidang pembangunan guna meningkatkan nilai ekonomi. Kondisi pembangunan fisik pada Desa Karang Anyar dapat dikatakan telah memenuhi standar yang ada, namun tidak berarti bahwa pembangunan fisik Desa Karang Anyar tidak harus lagi diperhatikan.

Di samping itu, sebuah pembangunan yang baik tentu saja harus memiliki keseimbangan agar kondisi desa yang sejahtera dapat tercapai. Tidak hanya pembangunan fisik desa, namun pembangunan non fisik desa juga wajib diperhatikan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa. Masalah yang kemudian timbul pada Desa Karang Anyar adalah kurang terlihatnya keseimbangan yang terjadi antara pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan fisik Desa Karang Anyar yang terus menerus berjalan tidak diiringi dengan pembangunan non fisik desa. Hal inilah yang menjadi masalah dan kemudian dapat menghambat keseimbangan pembangunan Desa Karang Anyar.

Agar pembangunan dapat terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemunpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa Karang Anyar dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan non fisik desa di mana kepala desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan tugas urusan pembangunan sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005, khususnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah tentang “Keterampilan kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa”. Penelitian ini penting untuk dikaji karena sebagian besar usaha-usaha pembangunan desa memang harus diupayakan secara inisiatif dan aktif, termasuk dengan keterampilan kepemimpinan oleh kepala desa agar tercapai perubahan ke arah yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana keterampilan kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam melaksanakan pembangunan non fisik desa?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan menganalisis tentang keterampilan dari kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan non fisik desa di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menjelaskan teori-teori ilmu pemerintahan, terutama teori-teori yang berkaitan dengan kepemimpinan maupun keterampilan kepala

desa.

- b. Untuk mendeskripsikan dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi perangkat-perangkat aparatur dan masyarakat Desa Karang Anyar dalam meningkatkan pembangunan non fisik desa
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Desa Karang Anyar dalam menjalankan pembangunan desa, khususnya terkait pembangunan non fisik desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Telah banyak berbagai penelitian tentang kepemimpinan kepala desa pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjutan terkait kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tercantum pada uraian di bawah membuktikan bahwa: pertama, gaya kepemimpinan kepala pekon yang demokratis mampu mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, kedua, kepemimpinan kepala desa merupakan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang kepemimpinan serta keterampilan kepala desa dalam pembangunan non fisik Desa Karang Anyar.

Ulbert Silalahi, dalam tesisnya yang berjudul “Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Pembangunan” menggunakan metode penelitian kuantitatif, serta kerangka teori berupa; intensitas pelaksanaan aktivasi motivasi, pengarahan, bimbingan, interaksi, komunikasi dua arah yang dilakukan kepala desa dan memberi kesempatan yang luas kepada warga desa untuk berpartisipasi dalam

pembuatan keputusan desa (sebagai variabel independe “X”) memengaruhi tingkat partisipasi warga desa dalam pembangunan desa (sebagai variabel “Y”), dengan kata lain jika X tinggi maka Y tinggi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan pemerintah desa dengan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Meningkatnya partisipasi warga desa dalam pelaksanaan pembangunan desa disebabkan oleh intensifnya kepala desa memberikan dorongan, pengarahan, bimbingan dan komunikasi dua arah.

Ambar Dwi Prasekti (2015) dalam tesisnya yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon dalam Pembangunan Infrastruktur periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan kerangka teori; gaya kepemimpinan diukur dengan indikator: prinsip partisipasi, prinsip kooperatif, hubungan kemanusiaan, prinsip pendelegasian dan pemencaran kekuasaan, prinsip fleksibilitas organisasi dan tata kerja, serta prinsip kreatifitas. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah bahwa kepemimpinan kepala pekon dalam pembangunan infrastruktur dikategorikan gaya kepemimpinan demokratis, hal tersebut dapat dilihat dari prinsip partisipasi, hubungan kemanusiaan yang akrab antara pemimpin dan bawahannya.

Penelitian yang penulis buat berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda dari segi metode, kerangka teori, dan sudut pandang penelitian karena penulis ingin mengkaji terkait keterampilan seorang pemimpin dalam pembangunan non fisik desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan teori keterampilan.

2.2. Tinjauan Kepemimpinan

2.2.1. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kartono (2002:153), kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Selanjutnya dikatakan bahwa pemimpin harus mahir melaksanakan kepemimpinannya. Syafie (2006:1) menyatakan pimpinan artinya orang yang mengepalai, pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis. Istilah pemimpin (*leader*) adalah orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan (*leadership*).

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan yang merupakan hasil proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan tidak hanya milik monopoli seseorang saja namun kepemimpinan dapat digunakan setiap orang dalam segala situasi. Sutikno (2014:16) menyatakan bahwa kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan seseorang. Kepemimpinan muncul dari dalam dan merupakan bentuk keputusan seseorang tersebut untuk mau menjadi seorang pemimpin baik bagi dirinya, keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan sosial dan negerinya.

Sedarmayanti (2009:119) mengungkapkan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah:

- a. Proses dalam memengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin.
- b. Hubungan interaksi antar pengikut dengan pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Proses memengaruhi aktivitas atau perilaku kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.
- d. Proses memberi pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan menyebabkan adanya kesediaan untuk melakukan aktivitas atau perilaku yang diinginkan untuk pencapaian sasaran.
- e. Proses memengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan situasi tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi tingkah laku orang-orang agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Menurut penulis, setiap perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam tercapainya suatu tujuan akan pasti memengaruhi orang yang ada dalam pengawasannya, pemimpin harus memiliki kemampuan lebih dari orang lain atau bawahannya agar proses mempengaruhi dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga akan terjadi keselarasan dalam bekerja dan tujuan-tujuan tertentu akan tercapai. Kepemimpinan (*leadership*) memang memiliki berbagai aspek

dimensi yang selalu menarik untuk dipelajari.

2.2.2. Prinsip-prinsip Kepemimpinan

Suatu kepemimpinan tingkat desa tidaklah dapat dikatakan berciri demokratis jika kegiatan pimpinan dan situasi kerja yang dihasilkannya tidak menunjukkan secara nyata penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut di bawah ini:

a. Prinsip partisipasi

Dalam suatu kepemimpinan desa yang demokratis masalah partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung jawab, dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan masalah-masalah juga menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program desa.

Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat, kemauan dan kesadaran bertanggungjawab dari setiap anggota staf dan bahkan individu diluar staf yang ada hubungan langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan program kerja desa pada lembaga/intansi kerjanya, dan yang selanjutnya menunjukkan partisipasi mereka secara aktif, dapat diartikan bahwa satu fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakannya dengan baik. Bukti keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi yakni masyarakat ikut bekerjasama dalam pembangunan desa, adanya masyarakat yang mengerti untuk

memberikan sumbangan baik itu dalam bentuk material, tenaga, ataupun makanan dan lain-lain.

b. Prinsip Koperatif

Adanya partisipasi anggota staf belum berarti bahwa kerjasama diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisipasi juga bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi bentuk tugas-tugas, wewenang tanggung jawab secara ketat diantara anggota-anggota, dimana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri-sendiri dan berpegang teguh pada tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing individu.

Partisipasi harus ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, dimana setiap individu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diperuntukkan khusus bagi dirinya, merasa berkepentingan pula pada masalah-masalah yang menyangkut suksesnya anggota-anggota lain, perasaan yang timbul karena kesadaran bertanggungjawab untuk mensukseskan keseluruhan program lembaga kerjanya. Adanya perasaan dan kesadaran semacam itu memungkinkan mereka untuk bantu membantu, bekerjasama pada setiap usaha pemecahan masalah yang timbul didalam lembaga, yang mungkin bisa menghambat keberhasilan dalam pencapaian tujuan program lembaga kerja secara keseluruhan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama.

c. Prinsip Hubungan Kemanusiaan yang Akrab

Suasana kerjasama demokratis yang sehat tidak akan ada, tanpa adanya rasa persahabatan dan persaudaraan yang akrab, sikap saling

hormat menghormati secara wajar diantara seluruh warga lembaga-lembaga kerja tersebut. Hubungan kemanusiaan seperti itu yang disertai unsur-unsur kedinamisan, merupakan pelicin jalan kearah pemecahan setiap masalah yang timbul dan sulit yang dihadapi. Pemimpin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan-hubungan sosial dan situasi pergaulan seperti tersebut.

d. Prinsip Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasaan dan Tanggung jawab

Pemimpin harus menyadari bahwa keterampilan yang dimiliki pemimpin, wewenang dan tanggungjawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan dan dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja juga mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemancaran keterampilan yang dimiliki pemimpin, wewenang, dan tanggung jawab agar proses kerja lembaga secara keseluruhan berjalan lancar efisien dan efektif. Melalui pendelegasian dan pemencaran kekuasaan dan tanggung jawab yang tepat, serasi dan merata, moral kerja akan ikut terbina secara sehat, semangat kerja dan perasaan tanggungjawab akan terbangkit dan bertumbuh dengan subur.

e. Prinsip Kefleksibelan Organisasi dan Tata kerja

Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efiseien dan efektif. Kefleksibelan organisasi menjamin organsisasi dan tata kerja serta

hubungan-hubungan kerja selalu sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan problema-problema baru yang slalu muncul dan berubah terus menerus, jadi jelas bahwa prinsip fleksibilitas itu merupakan faktor penting dalam organisasi administrasi pemerintahan yang demokratis.

f. Prinsip Kreatifitas

Pertumbuhan dan perkembangan suatu lembaga pemerintahan desa disamping faktor material dan fasilitas lainnya, terutaraa tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas kerja, sebagian besar berakar pada kreativitas kerja pada setiap personil pimpinan dan pelaksana didalam lembaga itn. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masyarakat, lembaga pemerintahan desa harus menjadi lembaga-lembaga kerja yang kreatif dan dinamis, dimana setiap anggota staf memiliki ide-ide, pikiran- pikiran dan konsep baru tentang prosedur, tata kerja dan metode-metode lebih efektif. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan dalam kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.

Kemampuan maupun keterampilan dalam kepemimpinan adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami suksesnya kepemimpinan, dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin.

2.3. Keterampilan Kepemimpinan

Adanya keterampilan dalam kepemimpinan kepala desa yang bermacam-macam diharapkan menambah kemampuan sebagai agen perubahan dalam desa sehingga mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas desa. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin menurut Kimball Wiles (1980) dalam Sutikno (2014:20), yaitu:

1. Keterampilan dalam kepemimpinan

Seorang pemimpin selain tahu tentang fungsi-fungsi kepemimpinan dan karakteristik pemimpin yang demokratis, ia juga harus menguasai keterampilan seperti: cara menyusun rencana secara bersama.

2. Keterampilan dalam hubungan insani

Dalam hubungan antar personil dalam organisasi, hubungan antar insani (manusia) yang baik harus timbul secara wajar. Inti dari hubungan-hubungan tersebut adalah rasa saling menghargai antar personil.

3. Keterampilan dalam proses kelompok

Dalam sebuah grup, diharapkan partisipasi anggota setiap kelompok dan pemimpinnya, dan seorang pemimpin harus dapat: mengenal bawahan dengan segala kelemahan dan kelebihanannya, menciptakan dan memelihara sikap saling percaya, mempercayai, dan menggunakan cara-cara bijaksana untuk menghilangkan pertentangan yang ada.

4. Keterampilan dalam administrasi personil

Keterampilan dalam administrasi personal adalah keterampilan mengenai cara memilih personal yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di semua fungsi. Untuk dapat mencapainya, pemimpin harus tau tentang: tujuan yang hendak dicapai, macam dan jenis pekerjaan yang dipimpinnya, cara atau teknik untuk mencari.

5. Keterampilan dalam penilaian

Saat menilai seseorang, pemimpin harus dapat menilai dirinya terlebih dahulu, yang termasuk keterampilan dalam menilai ini yaitu: menentukan tujuan penilaian, menentukan kriteria yang dipergunakan untuk menilai, mengumpulkan data dengan kriteria yang dapat diolah

2.4. Tinjauan Kepala Desa

2.4.1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan seseorang yang mengajukan diri, dipilih dan terpilih secara demokratis dalam Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serta menjadi kepala pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pemimpin perangkat aparatur pemerintahan desa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di desa. Kepala desa juga merupakan orang terpenting yang ada dalam unit pemerintah terkecil di desa sekaligus pemimpin perangkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 menyebutkan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 26 ayat 1

menyatakan kepala desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki fungsi sebagai pemimpin pada berbagai situasi dan kondisi karena kepala desa yang merupakan suatu konsep terapan kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga kepanjangan tangan dari pemerintah, juga sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Kepala desa merupakan seorang pemimpin pemerintahan desa yang mampu memengaruhi masyarakatnya dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya.

2.4.2. Kewajiban Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4, dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa,
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.5. Tinjauan Pembangunan Desa

2.5.1. Pembangunan Desa

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan juga sebagai upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Menurut Muhi (2011), pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam

membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu:

- a. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana dan prasarana) di pedesaan seperti jalan desa, listrik, drainase atau *talut*, bangunan rumah atau pemukiman, jembatan, tugu, kantor desa, bendungan, irigasi, sarana ibadah, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan fisik desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, *skill* dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, pendidikan, spiritual, penyuluhan pertanian dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa atau disebut juga pembangunan non fisik desa.

Siagian (2002:32) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *{nation*

building)”. Sedangkan Kartasasmita (dalam Siagian, 2002:32) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Sedangkan fisik desa berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan fisik desa adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

2.5.2. Ruang Lingkup Pembangunan Fisik desa

Fisik desa memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan fisik desa yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan fisik desa dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Pembangunan fisik desa, yaitu transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan.
- b. Pembangunan fisik desa yang mendukung produksi pertanian, yaitu: seperti peningkatan mutu dan pengelolaan pada petani.
- c. Pembangunan fisik desa yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air bersih perdesaan.

Pembangunan fisik desa yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat. Hal yang harus dipikirkan selanjutnya adalah kemampuan membangun fisik desa yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Sering kali terlihat jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak. Ini adalah gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi, karena setiap ada orang luar /pemerintah akan menilai kemampuan dalam mengelola sebuah desa.

Dalam pelaksanaan sering kali ditemui kendala khususnya pada pembangunan yang bersifat fisik, misalnya, para piliak yang terlibat dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pengoperasiannya, hal ini karena pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari pembangunan itu sendiri, sementara dampaknya terhadap

lingkungan masih diabaikan. Belum lagi terkadang dana yang seharusnya dianggarkan untuk pembangunan jalan dan jembatan sudah ditetapkan, masih saja di manfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.

Bubby (dalam Sugaudha, 1986: 41) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu istilah teknis, yang berarti membangkitkan masyarakat di Negara-negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Salah satu cara yang penting untuk dapat memaksimalkan pembangunan di desa Karang Anyar yaitu dengan keterampilan kepemimpinan kepala desa dalam memotivasi, menggerakkan serta partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Ketidakseimbangan merupakan kepincangan sosial yang sukar di atasi. Dan terhadap perubahan-perubahan yang fundamental tersebut timbul pendapat yang setuju dan tidak setuju. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sebagai akibat suatu proses perubahan, yang sering dimaksudkan dengan cara-cara baru yang dibawa oleh penjajah, maka efektivitas pola-pola yang lama yang berpotensi menjaga keseimbangan sosial menjadi rusak. Sedangkan pihak yang mendukungnya berpendapat bahwa perubahan fundamental perlu di dorong. Untuk mengubah pola kehidupan atau sistem masyarakat lama yang serba lamban dan kaku. Pada hakekatnya kedua pendapat yang saling bertentangan itu mempunyai tujuan yang sama yaitu menghilangkan atau

sekurang-kurangnya mengurangi gangguan-gangguan terhadap suatu perkembangan.

Keadaan ini dapat digambarkan sebagai suatu kenyataan yang umum berlangsung di pedesaan. Para petani umumnya bertindak dan berfikir secara tradisional dan kurang atau tidak memahami langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat. Bila pembangunan yang dimaksud bermakna suatu perkembangan dengan tujuan suatu perubahan, maka perubahan-perubahan yang konstruktif itu ditujukan untuk mengurangi kepingangan-kepingangan sosial yang timbul.

2.5.3. Ruang Lingkup Pembangunan non Fisik Desa

Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Perencanaan dapat diterapkan terhadap daerah-daerah yang kosong maupun daerah-daerah yang telah didiami, Pada konsep pembangunan, proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak berlangsung secara spontan, melainkan terjadi karena diusahakan atau direncanakan, sehingga aktualisasi perencanaan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam memperbaiki taraf hidup melalui pembangunan, tidak hanya pada salah satu aspek seperti aspek materi saja, melainkan meliputi aspek non materi bahkan non fisik.

Konsep pembangunan, khususnya pembangunan nasional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia, maka landasan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan pada konsep tersebut, pembangunan adalah pembangunan “manusia seutuhnya” yang berarti pembangunan yang sesuai dengan hakikat dan derajat kemanusiaan, dengan demikian pembangunan direncanakan dan dilakukan secara seimbang antara aspek fisik dan non fisiknya. Pembangunan yang kadang diartikan sebagai suatu kemajuan dalam aspek ekonomi dan fisik yang terlihat dari luar, sedangkan aspek non fisiknya terlupa justru dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

2.5.4. Program-program Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Karang Anyar

Berdasarkan APB Desa Karang Anyar Tahun Anggaran 2016, program-program pembangunan Desa Karang Anyar baik fisik maupun non fisik adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Fisik Desa Karang Anyar
 - 1) Pembangunan Gorong-gorong
 - 2) Pembangunan Talut/ Bronjong
 - 3) Pembangunan Embung
 - 4) Pembangunan Sumur Bor
 - 5) Pembangunan Bio Gas
 - 6) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung PAUD
 - 7) Pembangunan Poskesdes/Polindes
 - 8) Pembangunan Jamban Keluarga

- 9) Pembangunan Pasar Desa
 - 10) Pembangunan Kios Desa
 - 11) Pembangunan TPI
 - 12) Pembangunan Tambatan Perahu/ Dermaga
 - 13) Pembangunan Sarana Wiata Desa
 - 14) Pembangunan PerpustakaanDesa
 - 15) Pembangunan TPA
 - 16) Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor Desa
 - 17) Pembangunan/ Rehab Balai Desa
 - 18) Pembangunan/ Rehab Kantor BPD
 - 19) Pembangunan Sapras Kepariwisataaan
 - 20) Pembangunan Sapras Keolahragaan
 - 21) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 22) Pembangunan Pos Kamling
 - 23) Pembangunan Tugu Batas Desa
- b. Program Pembangunan Non Fisik Desa Karang Anyar (termasuk dalam kegiatan pembinaan masyarakat dan kegiatan pembangunan masyarakat)
- 1) Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - a) Insentif LinmasDesa
 - b) Insentif LimasDusun
 - 2) Kegiatan Peringatan HUT RI
 - 3) Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Agama
 - 4) Kegiatan Pengajian Majelis Taklim

- 5) Kegiatan Pembinaan RISMA
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan MTQ
- 7) Kegiatan Sunatan Massal
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan TPA
- 9) Kegiatan Pengelolaan Sanggar Belajar Seni Budaya
- 10) Kegiatan Pendataan Administrasi Kependudukan
- 11) Kegiatan Promosi/ Pameran Unggulan Desa
- 12) Kegiatan Pembangunan Keolahragaan
- 13) Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/ HIV/ AIDS
- 14) Kegiatan Pelatihan Perangkat Desa
- 15) Pelatihan BPD
- 16) Kegiatan 10 Program PKK
- 17) Kegiatan Kesekretariatan PKK
- 18) Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK

2.6. Kerangka Pemikiran

Pembangunan non fisik desa membutuhkan pemimpin yang harus mampu membawa perubahan bagi masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Pemimpin masyarakat desa adalah kepala desa, sehingga kepala desa harus memiliki keterampilan yang dapat berguna dalam pembangunan non fisik desa baik secara moril maupun materil.

Keterampilan kepemimpinan penting ada di dalam diri setiap kepala desa. Begitu pun dengan Kepala Desa Karang Anyar, dengan adanya keterampilan kepemimpinan ini, diharapkan menambah kemampuan kepala desa dalam

meningkatkan pembangunan non fisik desa. Keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Kimball Wiles (1980) dalam Sutikno (2014:20), yaitu:

1. Keterampilan dalam kepemimpinan

Seorang pemimpin mengetahui fungsi-fungsi kepemimpinan dan karakteristik pemimpin yang demokratis, juga harus menguasai keterampilan seperti: cara menyusun rencana secara bersama.

2. Keterampilan dalam hubungan insani

Dalam hubungan antar personil dalam organisasi, hubungan antar insani (manusia) yang baik harus timbul secara wajar. Inti dari hubungan tersebut adalah rasa saling menghargai antar personil.

3. Keterampilan dalam proses kelompok

Dalam sebuah grup, diharapkan partisipasi anggota setiap kelompok dan pemimpinnya. Dan seorang pemimpin harus dapat: mengenal bawahan dengan segala kelebihan dan kelemahannya, menciptakan dan memelihara sikap saling percaya, memercayai dan menggunakan cara-cara bijaksana untuk menghilangkan pertentangan yang ada.

4. Keterampilan dalam administrasi personil

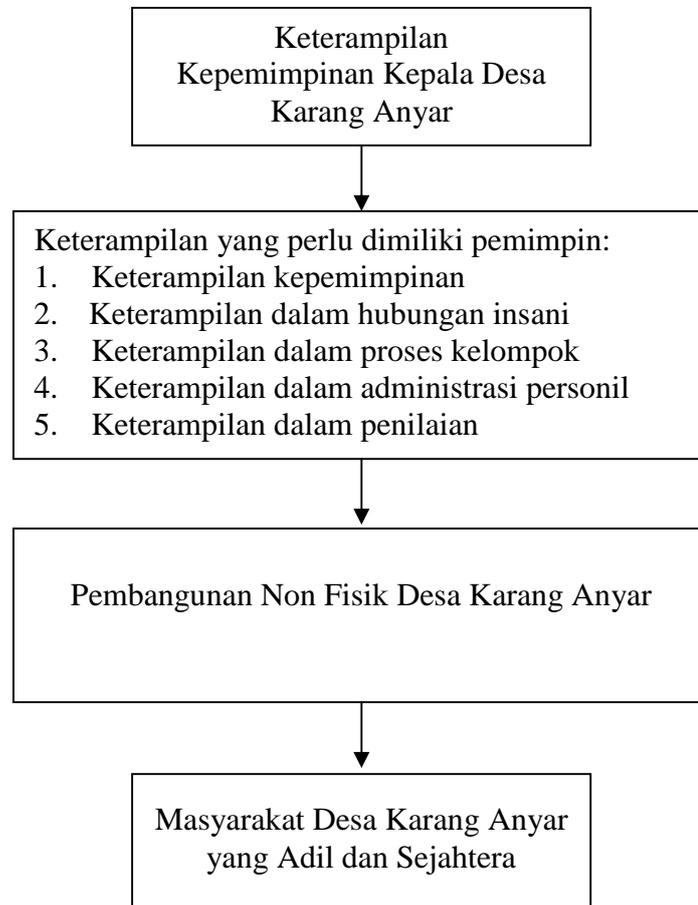
Keterampilan dalam administrasi personil adalah keterampilan mengenai cara memilih personal yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di semua fungsi. Untuk dapat mencapainya, pemimpin harus mengetahui tentang: tujuan yang hendak dicapai, macam dan jenis pekerjaan yang dipimpinnya, serta cara atau teknik untuk mencari.

5. Keterampilan dalam penilaian

Saat menilai seseorang, pemimpin harus dapat menilai dirinya terlebih dahulu, yang termasuk keterampilan, dalam menilai yaitu: menentukan tujuan penilaian, menentukan kriteria yang dipergunakan untuk menilai, mengumpulkan data dengan kriteria yang dapat diolah.

Pada pra-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa demi terwujudnya pembangunan non fisik Desa Karang Anyar yang sesuai dengan harapan, maka Desa Karang Anyar telah menyusun berbagai program pembangunan non fisik desa yang tercakup pada dua poin besar pembangunan non fisik, yaitu: pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan non fisik Desa Karang Anyar yang kemudian menghasilkan tujuan bersama yaitu terciptanya masyarakat Desa Karang Anyar yang adil dan sejahtera.

Penelitian ini secara sederhana ingin meneliti berbagai keterampilan yang perlu dimiliki pemimpin termasuk Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa guna terciptanya Masyarakat Desa Karang Anyar yang adil dan sejahtera. Berikut adalah bagan kerangka pikir dari penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Jenis Penelitian

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini selain dilakukan proses pengambilan data juga dituntut penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam. Penelitian berupa deskriptif diharapkan hasilnya mampu memberikan gambaran riil mengenai kondisi di lapangan tidak hanya sekedar sajian data.

Menurut Moleong (2005: 2), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, Secara holistik dan dengan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian yaitu mendeskripsikan mengenai Keterampilan yang ada dalam diri kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibutuhkan agar data yang diperoleh sesuai maksud dan tujuan penelitian, permasalahan yang diteliti akan lebih fokus dan tidak keluar dari judul yang ditentukan. Fokus penelitian ini yaitu keterampilan yang ada dalam kepemimpinan yang harus dimiliki Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa yang terdiri dari:

1. Keterampilan dalam kepemimpinan

Indikator keterampilan dalam kepemimpinan yang harus dimiliki adalah: Kepala Desa sebagai pemimpin mengetahui fungsi-fungsi kepemimpinan dengan baik dan dapat terampil dalam menyusun rencana terkait pembangunan desa secara bersama.

2. Keterampilan dalam hubungan insani

Indikator keterampilan dalam hubungan insani yang harus dimiliki adalah kemampuan Kepala Desa Karang Anyar dalam menjalin hubungan baik antar perangkat desa maupun terhadap masyarakat Desa Karang Anyar.

3. Keterampilan dalam proses kelompok

Indikator keterampilan dalam proses kelompok yang harus dimiliki oleh Kepala Desa Karang Anyar adalah sejauh mana kepala desa mampu berpartisipasi serta mendorong perangkat desa untuk bekerja sama secara teratur dan efisien tanpa menimbulkan adanya pertentangan antar perangkat desa.

4. Keterampilan dalam administrasi personil

Indikator keterampilan dalam administrasi personil yang harus dimiliki Kepala Desa Karang Anyar adalah sejauh mana kepala desa mampu

mengetahui kinerja para perangkat desa yang dipilih serta dapat menempatkannya sesuai dengan tupoksi yang ada sehingga kelak dapat memudahkan kinerja kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

5. Keterampilan dalam penilaian

Indikator keterampilan dalam penilaian yang harus dimiliki Kepala Desa Karang Anyar adalah sejauh mana kepala desa mampu melaksanakan penilaian secara jujur baik kepada dirinya maupun terhadap anggotanya.

3.3. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan pada pihak ataupun tokoh terkait serta masyarakat desa yang berhubungan langsung dan dapat diperoleh informasi maupun data penelitian ini.

3.4. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat sebelum peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono (2012:54) penentuan informan caranya dengan penulis memiliki orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan,

selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dan informan sebelumnya penulis dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

1. Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian yang digunakan penulis dalam menentukan informan untuk melakukan penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan subjek diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Karang Anyar
- b. Sekretaris Desa Karang Anyar
- c. Kepala urusan bidang pemerintahan Desa Karang Anyar
- d. Kepala urusan bidang perekonomian dan Kesejahteraan Desa Karang Anyar
- e. Kepala urusan bidang perencanaan Desa Karang Anyar
- f. Kepala urusan bidang umum Desa Karang Anyar
- g. Beberapa Kepala Dusun di Desa Karang Anyar

3.5. Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, Sumber data dapat ditulis atau direkam, dalam penelitian ini yang akan diwawancarai antara lain adalah: Kepala Desa Karang Anyar, Sekretaris Desa Karang Anyar, Kaur Bidang Pemerintahan Desa Karang Anyar, Kaur Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Desa Karang Anyar, beberapa Kepala Dusun Desa Karang Anyar, serta beberapa masyarakat Desa Karang Anyar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan penelitian sebelumnya. Data sekunder ini diambil dari permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian, lalu dokumen arsip Desa Karang Anyar, dan dokumen musyawarah rencana pembangunan desa.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Fathoni (2011:104) data di lapangan yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik yang disebut teknik pengumpulan data. Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data ini disusun melalui alat bantu yang disebut instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati objek penelitian langsung serta meninjau lokasi yang menjadi objek penelitian, dalam teknik atau kegiatan ini dilakukan juga kegiatan pencatatan tentang berbagai hasil pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Penulis menggunakan *passive participant observation*, menurut Fuad (2013:11) *passive participant observation* yaitu penulis datang ke lokasi penelitian namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan narasumber yang diamati, penulis sebagai pihak luar pada kondisi tertentu secara langsung kadang terlibat dengan kegiatan narasumber dan di waktu berbeda tidak ikut kegiatan narasumber.

2. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan langsung dengan sumber informasi yang ada berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat dan diajukan oleh penulis sebagai panduan wawancara. Melalui tanya jawab dan tatap muka secara langsung antara penulis dengan informan secara mendalam, informasi dan data kepemimpinan kepala desa pada pembangunan non fisik desa dalam perspektif keterampilan dalam kepemimpinan yang diperlukan sudah benar-benar penulis dapatkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan kepala desa, arsip administrasi desa, profil desa, foto-foto pembangunan non fisik desa, dokumen musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) dan lain-lain. Dokumen berasal dari arsip Seketaris Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Mengutip dari Pramono (2014:12), penulis menyelesaikan dengan melalui beberapa tahapan pengolahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai informan yang telah ditentukan, kemudian menganalisis hasil wawancara.

2. Data yang telah dikumpulkan agar mudah dianalisis dan disimpulkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara. Penulis menggunakan analisis yang menghasilkan deskriptif analisis.
3. Proses analisis data menggunakan pola berfikir induktif yaitu proses pengolahan data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari responden kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data secara induktif, dengan beberapa alasan. *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan sebagaimana yang terdapat dalam realita. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat lingkungan peneliti menjadi eksplisit serta dapat dikembangkan. *Ketiga*, analisis induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Menurut Moleong (2007:15-20) teknik analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Tahapan ini peneliti memilih hal pokok. Proses ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yakni wawancara dan dokumentasi. Setelah dikaji langkah berikutnya adalah membuat rangkuman data yang disebut dengan

abstraksi yaitu usaha membuat ringkasan yang inti, proses dan persyaratan yang berasal dari informan dapat terjaga.

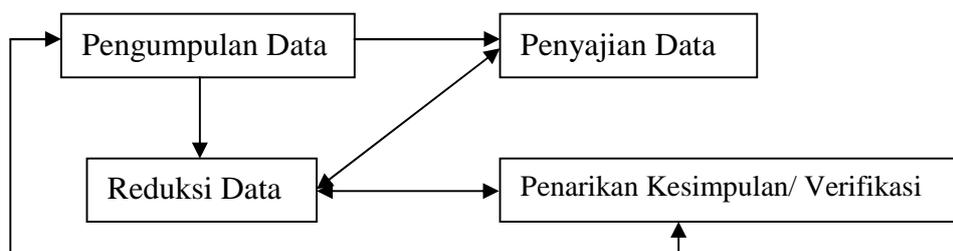
2. Penyajian Data

Penyajian data dalam analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau membuat uraian singkat yang juga akan didukung dengan *chart* atau tabel. Pada langkah ini penulis berasaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan hubungan antar variabel fenomena. Kemudian dari hasil reduksi data dimana memilah-milah data yang cocok dalam penelitian.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Teknik verifikasi yang digunakan yakni memaknai analisis secara spesifik dan menarik serta menjelaskan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berlangsung dengan tiga langkah yaitu dengan memikirkan ulang selama penulisan, meninjau ulang catatan-catatan di lapangan dan melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data, kemudian penulis mengungkapkan kesimpulan dalam penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

Berikut adalah bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman



Gambar 2: Bagan Analisis Data.

Sumber: Sugiyono

Berdasarkan data yang penulis peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis mencoba mengambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap bagaimana keterampilan Kepala Desa Karang Anyar, dan bagaimana kemampuan yang dimiliki kepala desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali data yang telah tersusun dengan melihat catatan lapangan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Lampung Selatan

4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan

Terbentuknya kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan dasar pokok Undang-Undang Dasar 1945. Bab VI pasal 18 disebutkan pembagian daerah di Indonesia atas Daerah Besar dan Daerah Kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan Hak Asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai realisasi dari pasal 18 UU Dasar 1945, lahir UU Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini mengatur tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang pada hakekatnya adalah UU Pemerintah di daerah yang pertama, isinya antara lain ialah mengembalikan kekuasaan Pemerintahan di Daerah kepada aparat berwenang yaitu Pamong Praja dan Polisi. Selain itu, untuk menegakkan Pemerintahan di Daerah yang rasional dengan mengikutsertakan wakil-wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat.

Selanjutnya disusul dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam wilayah Republik Indonesia yang susunan tingkatannya adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Daerah Tingkat I
2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah tingkat II
3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, maka lahirlah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950, yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, maka keluarlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD Kabupaten di seluruh Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan selanjutnya, guna lebih terarahnya pemberian otonomi kepada daerah bawahannya, selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 14 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Selatan beserta DPRD-nya dan tujuh buah dinas otonom.

Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur Pemerintahan Kabupaten, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif dari pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
4. Penpres Nomor 6 Tahun 1959
5. Penpres Nomor 5 Tahun 1960

Selanjutnya, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang sifatnya lebih luas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pemerintahan saja, tetapi lebih luas dari itu, termasuk dinas-dinas vertikal (aparatus pusat di daerah) yang diatur pula di dalamnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi rill dan seluas-luasnya, tetapi otonomi nyata dan bertanggungjawab serta bertujuan pemberian

otonomi kepada daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Daftar kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Lampung Selatan ialah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bakauheni
2. Kecamatan Candipuro
3. Kecamatan Jati Agung
4. Kecamatan Kalianda
5. Kecamatan Katibung
6. Kecamatan Ketapang
7. Kecamatan Merbau Mataram
8. Kecamatan Natar
9. Kecamatan Palas
10. Kecamatan Penengahan
11. Kecamatan Rajabasa
12. Kecamatan Sidomulyo
13. Kecamatan Sragi
14. Kecamatan Tanjung Bintang
15. Kecamatan Tanjungsari
16. Kecamatan Way Panji
17. Kecamatan Way Sulan

4.1.2. Lokasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibukota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 972.579 jiwa (LSDA 2016). Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° sampai dengan 105° 45' Bujur Timur dan 5° 15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini maka daerah Kabupaten Lampung Selatan tergolong merupakan daerah beriklim tropis.

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km² (LSDA 2007), dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa (LSDA 2007), memiliki luas daratan 2.109,74 km² yang terbagi dalam 17 kecamatan dan tersiri dari 248 desa dan tiga kelurahan.

4.2. Kecamatan Jati Agung

4.2.1. Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 (perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1999), dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung No. 81

Tahun 1999 yang meresmikan Kecamatan Jati Agung dengan ibukota Marga Agung.

4.2.2. Batas Geografis dan Penduduk Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung memiliki letak paling utara dari Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah sebesar 164,47 km². Kecamatan Jati Agung berbatas geografis sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.

Penduduk yang menetap di Kecamatan Jati Agung secara umum dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Meskipun begitu, mayoritas penduduk yang berdomisi di Kecamatan Jati Agung saat penelitian ini dilakukan adalah penduduk pendatang, hanya sebagian kecil penduduk asli Lampung yang tinggal di Kecamatan Jati Agung.

Beberapa diantara masyarakat asli Lampung yang menetap di Kecamatan Jati Agung tersebut berdomisili di lima desa, yaitu Desa Gedong Harapan, Desa Margodadi, Desa Way Huwi, Desa Jatimulyo,

dan Desa Karang Anyar. Sementara penduduk pendatang menempati hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Jati Agung. Penyebab banyaknya penduduk pendatang di seluruh wilayah desa yang ada di Kecamatan Jati Agung adalah karena wilayah ini menjadi salah satu lokasi transmigrasi swakarsa yang dilakukan pada masa Orde Baru tepatnya pada tahun 1969.

Mayoritas penduduk pendatang di Kecamatan Jati Agung berasal dari Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta), Bali, Sulawesi (Bugis), dan juga dari beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat (Minang), Sumatera Utara (Batak), dan Sumatera Selatan (Semendo). Penduduk Kecamatan Jati Agung baik penduduk asli maupun penduduk pendatang yang tersebar di seluruh desa disajikan dalam Tabel 1. Dari data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa luas wilayah Kecamatan Jati Agung berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 adalah 164 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 109.834 jiwa dan secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kecamatan Jati Agung mencapai 667,81 jiwa per 81 Km².

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) setiap desa di Kecamatan Jati Agung tahun 2014

| Desa | Luas | | Penduduk (Jiwa) | | Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²) |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--|
| | Km ² | % | Jumlah | % | |
| Way Huwi | 5 | 3,00 | 13.558 | 12,34 | 2.750.10 |
| Jatimulyo | 11 | 6,44 | 16.492 | 15,02 | 1.557.32 |
| Banjar Agung | 6 | 3,56 | 2.249 | 2,09 | 391.47 |
| Gedung Harapan | 5 | 2,83 | 587 | 0,53 | 124.30 |
| Gedung Agung | 5 | 3,24 | 1.426 | 1,30 | 267.54 |
| Margomulyo | 9 | 5,57 | 2.672 | 2,43 | 291.70 |
| Sidodadi Asri | 5 | 2,92 | 5.611 | 5,11 | 1166.53 |
| Purwotani | 6 | 3,89 | 2.362 | 2,15 | 369.06 |
| Sumber Jaya | 6 | 3,65 | 3.986 | 3,63 | 664.33 |
| Margodadi | 6 | 3,94 | 2.688 | 2,45 | 414.81 |
| Margo Lestari | 6 | 3,80 | 2.673 | 2,43 | 247.68 |
| Marga Agung | 6 | 3,50 | 4.135 | 3,76 | 717.88 |
| Marga Karya | 7 | 4,35 | 3.154 | 2,87 | 441.12 |
| Sinar Rejeki | 29 | 17,84 | 7.087 | 6.45 | 241.55 |
| Sidoharjo | 6 | 3,71 | 2.831 | 2,58 | 464.10 |
| Rejo Mulyo | 7 | 4,35 | 5.570 | 5,07 | 779.02 |
| Karang Anyar | 11 | 6,54 | 15.642 | 14,24 | 1455.07 |
| Fajar Baru | 6 | 3,89 | 5.924 | 5,39 | 1925.63 |
| Karang Sari | 7 | 4,41 | 4.292 | 3,91 | 592.00 |
| Karang Rejo | 7 | 4,51 | 5.047 | 4,60 | 680.19 |
| Margorejo | 7 | 4,07 | 1.812 | 1,65 | 270.85 |
| Jumlah | 164 | 100,00 | 109,834 | 100,00 | 667,81 |

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Lampung Selatan 2014

Keterangan dari Tabel 1 mengenai luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk dapat diketahui bahwa Desa Sinar Rejeki memiliki wilayah paling luas di Kecamatan Jati Agung, yaitu seluas 29 Km atau 17,84%. Kemudian Desa Jatimulyo adalah desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Jati Agung, yaitu sebanyak 16.492 jiwa atau 15,02%, sedangkan Desa Karang Anyar sebagai lokasi penelitian menjadi desa dengan jumlah penduduk berjumlah 15.642 jiwa atau 14,24%.

Desa Karang Anyar sebagai desa dengan jumlah penduduk terpadat kedua setelah Desa Jatimulyo di Kecamatan Karang Anyar adalah karena desa ini sebagai pusat perekonomian, sebagai contoh terdapatnya Pasar Jati Agung. Selain itu, desa ini juga memiliki letak yang cukup dekat dengan Kota Bandar Lampung sehingga banyak pula masyarakat yang bekerja di Kota Bandar Lampung akhirnya memilih pindah ke Desa Karang Anyar.

Salah satu penyebab banyaknya masyarakat pindah ke Desa Karang Anyar antara lain juga dikarenakan harga perumahan dan harga tanah di desa ini masih relatif murah dibandingkan dengan harga tanah di Kota Bandar Lampung. Karena hal itulah akhirnya menjadi salah satu pemicu penyebab Desa Karang Anyar menjadi desa dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Kecamatan Jati Agung.

4.3. Desa Karang Anyar

4.3.1. Sejarah Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menurut cerita penduduk setempat, Desa Karang Anyar dahulunya merupakan hutan belantara, kemudian datanglah sejumlah orang dari Provinsi Jawa Tengah pada sekitar tahun 1935. Warga yang berasal dari Jawa Tengah tersebut pada akhirnya membuka lahan hutan dan menjadikannya sebuah desa yang kemudian diberi nama Karang Anyar, sesuai dengan

nama desa dari tempat mereka berasal yaitu Desa Karang Anyar di Jawa Tengah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Karang Anyar selama ini dikenal demokratis dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Desa yang ada bertujuan untuk mewujudkan peran aktif masyarakat sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan desa.

Desa Karang Anyar sejak terbentuk tahun 1935 sampai sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa atau kepala kampung, adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa dan periode kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar

| No | Nama Kepala Desa | Tahun Memerintah |
|----|------------------|-------------------|
| 1 | Usuf | 1935-1949 |
| 2 | Ponco Wiangun | 1949-1953 |
| 3 | Usuf | 1953-1958 |
| 4 | Sarmo | 1958-1961 |
| 5 | Usuf | 1961-1963 |
| 6 | Adi Sumarto | 1963-1965 |
| 7 | Muhni | 1965-1967 |
| 8 | Abdul Hakim | 1967-1997 |
| 9 | Suparmin | 1997-2002 |
| 10 | Suparmin | 2002-2013 |
| 11 | Sumanto | 2013 s/d sekarang |

Sumber: RPJM Desa Karang Anyar tahun 2015

4.3.2. Keadaan Umum Wilayah Desa Karang Anyar

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Karang Anyar

Dalam monografi Desa Karang Anyar tahun 2015, luas tanah Desa Karang Anyar adalah 4.810 Ha dengan tinggi pusat pemerintahan desa 450 M dari permukaan laut.

Adapun batas wilayah Desa Karang Anyar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Rejo Mulyo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Karang Sari
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Karang Rejo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Marga Karya

2. Orbitasi Desa Karang Anyar

Jarak tempuh dari Desa Karang Anyar ke pusat pemerintahan terdekat adalah:

- a. Jarak ke ibukota Kecamatan Jati Agung 8 Km
- b. Jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Lampung Selatan 45 Km
- c. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten Lampung Selatan 2,5 jam

3. Visi dan Misi Desa Karang Anyar

Adapun visi dan misi Desa Karang Anyar sebagai berikut:

- a. Visi
Kebersamaan dalam membangun Desa Karang Anyar yang lebih maju.

b. Misi

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa Karang Anyar yang ada.
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa berupaya mewujudkan Desa Karang Anyar yang aman, tentram dan damai.
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.3. Kondisi Penduduk dan Pemerintahan Desa Karang Anyar

1. Penduduk Desa Karang Anyar

Berdasarkan data monografi Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan diketahui memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.607 jiwa yang terdiri dari 4.711 kepala keluarga.

Berikut tabel jumlah penduduk Desa Karang Anyar yang tersebar di 17 dusun yang berada di Desa Karang Anyar:

Tabel 3. Nama Dusun dan Jumlah Penduduk Dusun yang berada di Desa Karang Anyar

| No | Nama Dusun | Jumlah Penduduk | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Kepala Keluarga | Laki | Perempuan | Total |
| 1 | I A | 212 | 588 | 579 | 1.167 |
| 2 | I B | 250 | 505 | 621 | 1.126 |
| 3 | II A | 244 | 450 | 460 | 910 |
| 4 | II B | 229 | 408 | 395 | 803 |
| 5 | III A | 247 | 503 | 450 | 953 |
| 6 | III B | 168 | 301 | 233 | 534 |
| 7 | III C | 254 | 562 | 466 | 1.028 |
| 8 | IV A | 286 | 509 | 504 | 1.013 |
| 9 | Karang Turi | 288 | 592 | 575 | 1.167 |
| 10 | Pal Putih I | 224 | 473 | 437 | 910 |
| 11 | Pal Putih II | 234 | 401 | 372 | 773 |
| 12 | Tegalega | 260 | 387 | 464 | 851 |
| 13 | Karang Indah | 267 | 417 | 485 | 902 |
| 14 | Karang Tani | 171 | 385 | 328 | 713 |
| 15 | Priangan | 302 | 545 | 507 | 1.052 |
| 16 | Karang Mas | 485 | 655 | 801 | 1.456 |
| 17 | Permata Asri | 590 | 1.113 | 1.136 | 2.249 |
| Jumlah | | 4.711 | 8.794 | 8.813 | 17.607 |

Sumber: Data Monografi Desa Karang Anyar tahun 2016.

2. Pemerintahan Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar saat ini masih dipimpin oleh Sumanto yang telah terpilih untuk menjadi kepala desa pada tahun 2013, yang juga didampingi oleh sekretaris desa yaitu, Hermanto. Berikut adalah nama-nama jabatan Pemerintahan Desa Karang Anyar beserta pejabat aparaturnya:

Tabel 4. Nama-nama Jabatan Pemerintahan Desa Karang Anyar beserta Pejabat Aparatur Desa

| No | Nama Pejabat Desa | Jabatan |
|----|--------------------|--------------------|
| 1 | Sumanto | Kepala Desa |
| 2 | Hermanto | Sekretaris Desa |
| 3 | Sunaryo | Kaur Pemerintahan |
| 4 | Tri Agung S | Kaur Pelayanan |
| 5 | Abdu Rachman Saleh | Kaur Kesra |
| 6 | Z. Subaidi | Kaur Perencanaan |
| 7 | Desi Novia Sari | Kaur Umum |
| 8 | Jaryo | Kadus I A |
| 9 | Misba | Kadus I B |
| 10 | Dalijan | Kadus II A |
| 11 | saptono | Kadus II B |
| 12 | Sarshono | Kadus III A |
| 13 | M. Muslim | Kadus III B |
| 14 | Tukiran | Kadus III C |
| 15 | Bahrudin | Kadus IV A |
| 16 | Sumaji | Kadus Karang Turi |
| 17 | Lasono | Kadus Pal Putih 1 |
| 18 | Hasim | Kadus Pal Putih 2 |
| 19 | Wawan. H | Kadus Tega Lega |
| 20 | Mudiono | Kadus Karang Indah |
| 21 | Kuswanto | Kadus Karang tani |
| 22 | M. Agung | Kadus Priangan |
| 23 | Mariono | Kadus Karang Mas |
| 24 | Agus S | Kadus Permata Sari |

Sumber: Monografi Desa Karang Anyar tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Karang Anyar terdapat 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 5 orang Kepala Urusan (Kaur) yang bertugas membantu Kepala Desa, dan 17 Kepala Dusun

3. Sarana dan Prasarana Desa Karang Anyar

Sarana dan prasarana dipergunakan untuk menunjang kegiatan dan segala aktifitas kehidupan masyarakat, termasuk menunjang

pendidikan, perekonomian, pengetahuan agama, dan kesehatan. Berikut ini adalah informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Karang Anyar:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana di Desa Karang Anyar Tahun 2016

| Sarana dan Prasarana | Jenis | Jumlah |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Sarana Peribadahan | a. Masjid | 12 Unit |
| | b. Mushola | 27 Unit |
| Pemakaman | c. Makam | 15 Unit |
| Sarana Air Bersih Desa | a. Sumur Bor | 4 Unit |
| Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa | a. Poskesdes | 1 Unit |
| | b. Puskesmas | 1 Unit |
| | c. Posyandu | 11 Kelompok |
| | d. Dukun Terlatih | 13 Orang |
| | e. Bantuan Posyandu | PMT Balita |
| | f. Bidan Desa | 4 Orang |
| Sarana Pendidikan | a. SD Negeri dan Swasta | 6 Unit 4 Unit |
| | b. Pondok Pesantren | 1 Unit |
| | c. SLTP | 14 Unit |
| | d. PAUD dan TK | |

Sumber: Data Monografi Desa Karang Anyar tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasana yang paling banyak dimiliki adalah sarana peribadahan yang berjumlah 39 unit. Sarana paling minim yang dimiliki desa Karang Anyar adalah sarana air bersih (sumur bor) yang hanya berjumlah 4 unit. Sarana air bersih ini minim dimiliki masyarakat karena topografi Desa Karang Anyar termasuk wilayah dataran rendah serta memiliki saluran imigrasi, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dengan masalah air bersih.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Keterampilan kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa, yaitu sebagai berikut:

1. Keterampilan kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam pembangunan non fisik desa dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut didasarkan pada telah dimiliki dan diterapkannya berbagai keterampilan seorang pemimpin, antara lain: keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personil serta keterampilan dalam penilaian. Keterampilan-keterampilan tersebut digunakan oleh Kepala Desa Karang Anyar sebagai modal utamanya dalam melaksanakan pembangunan non fisik desa. Penerapan berbagai keterampilan tersebut oleh kepala desa terutama untuk menggerakkan secara langsung perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban maupun tugas pokok dan fungsi serta ikut turut andil berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan non fisik Desa Karang Anyar.

2. Kepemimpinan Kepala Desa Karang Anyar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan non fisik desa pun turut menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip-prinsip tersebut secara langsung maupun tidak langsung mampu mendorong perangkat desa serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan maupun pelaksanaan pembangunan non fisik desa.
3. Pembangunan non fisik Desa Karang Anyar dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut dilandasi oleh fokus kepala desa selama memimpin yang tidak hanya memerhatikan pembangunan pada sektor fisik namun juga memerhatikan pada sektor pembangunan non fisik serta berbagai keterampilan yang telah diterapkan oleh kepala desa dalam kepemimpinannya.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa Karang Anyar

Kepala Desa Karang Anyar sebagai seorang pemimpin di wilayah pemerintahan desa, harus dapat lebih memerhatikan dan berfokus pada program-program pembangunan non fisik yang akan berjalan dalam waktu dekat sesuai dengan program kerja yang telah ada dan disusun dalam APB Desa dan tidak hanya berfokus pada perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan disusun dalam program kerja pada tahun berikutnya.

2. Bagi Staff maupun Perangkat Desa Karang Anyar

Bagi seluruh staff maupun perangkat Desa Karang Anyar harus memiliki semangat maupun inisiatif yang tinggi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan non fisik desa. Terutama dengan tujuan kepala desa yang ingin agar pembangunan non fisik dapat berjalan seimbang dan baik seharusnya mampu memotifasi dan menjadi penggerak dalam pembangunan non fisik desa yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Azwar, Syaifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuad, Anis Dan Kandung S. Nugroho. 2013. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sanusi, Achmad. 2009. *Kepemimpinan Sekarang Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2009. *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutikno, Sobry. 2014. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Lombok: Holistika.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yukl, Gary. 1994. *Leadership In Organization (Third Edition)*. New Jersey: Prentice Hall International.

Jurnal Ilmiah:

Karauwan, Richard. 2010. *Tinjauan Tentang Prilaku Kepemimpinan Kepala Desa Kabupaten Minahasa*.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1566/125>

9. diakses pada senin, 21 April 2015 pukul 21:05 WIB.

Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Jawa Barat: IPDN
Artikel dari alimuhi.staff.ipdn.ac.id. Diakses pada Senin, 21 April 2015
Pukul 20:35 WIB

Pramono, Anggi Dwi. 2014. *Gaya Kepemimpinan Walikota Bandar Lampung Dalam Bidang Kesehatan Dan Pendidikan*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung. Skripsi.

Prasekti, Ambar Dwi. 2015. Tesis. *Gaya Kepemimpinan Kepala Pekon Dalam Pembangunan Insfrastuktur Periode 2012-2015*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung. Tesis.

Silalahi, Ulbert. *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan*.
<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82686&lokasi=local>. Di
Akses pada Hari Minggu, 10 Mei 2015 Pukul 10:20 WIB

Sumber Dokumen:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.